



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



Pertemuan Jaringan South East Asean Press Council Network (SEAPC-NET) di Bali pada Rabu (4/12/19) Mengangkat Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH sebagai Ketua SEAPC - NET selama 2 Tahun Kedepan (Berita di halaman 4)

Media Harus Produksi Informasi Sehat

Dewan Pers menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar dunia pers terutama para konstituen atas segala ikhtiarnya dalam memajukan kualitas kemerdekaan atau kebebasan pers di Indonesia....**hal 2**

Publik Perlu Informasi Benar, Baik dan Bermanfaat

Indonesia sudah sampai pada suatu titik yang tidak bisa balik kembali (*Indonesia at the point of no return*). Harus terus maju. Terkait kemerdekaan pers, kita harus mengisinya sehingga semakin lebih berkualitas....**hal 3**

Indonesia Pimpin Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara

Ketua Dewan Pers Indonesia Mohammad NUH terpilih sebagai Ketua South East Asian Press Council Network (*SEAPC-Net*) dalam pertemuan pertama Majelis Umum lembaga baru ini. Pemilihan pimpinan jaringan Dewan Pers Asia Tenggara ini dilaksanakan 4 Desember 2019 di Nusa Dua Bali....**hal 4**

Mohammad NUH:

Media Harus Produksi Informasi Sehat

Dewan Pers menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar dunia pers terutama para konstituen atas segala ikhtiarinya dalam memajukan kualitas kemerdekaan atau kebebasan pers di Indonesia.

Media massa mempunyai peran besar untuk menciptakan ruang koneksi antara gagasan-gagasan besar dari siapapun: masyarakat dan tokoh-tokohnya, agar *nyambung* antara satu dengan yang lain. Disinilah pentingnya ruang publik yang diisi dengan informasi-informasi yang sah.

Informasi-informasi itu diibaratkan seperti oksigen. Kalau oksigen itu sehat, maka akan menyehatkan. Namun kalau oksigen itu terkontaminasi, maka tidak akan menyehatkan, justru akan menyakitkan.

Karena itu, pers sebagai produsen informasi harus selalu menghasilkan informasi yang sah. Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghirup informasi yang sehat dan menyehatkan.

Kompetensi

Untuk itulah, tidak ada pilihan lain bagi produsen informasi untuk senantiasa mampu menghasilkan oksigen yang *fresh*. Untuk menghasilkan oksigen yang segar itu ada beberapa persyaratan:

Pertama kompetensi. Para jurnalis wajib memiliki kompetensi yang yang mencukupi supaya tidak *disconnect* antara apa yang diceritakan dengan realitas yang diceritakan. Terkait hal ini, Dewan Pers ingin mengajak para jurnalis untuk terus menerus melakukan *upgrading*.

Pelatihan berkelanjutan bagi para jurnalis diperlukan karena zaman terus berubah. Kalau jurnalis tidak mengikuti perkembangan dan tidak melakukan perbaikan terus menerus dapat dipastikan akan ada diskoneksi antara apa yang diceritakan dan objek yang harusnya dia ceritakan seperti disebutkan tadi.

Kedua, perlindungan. Meskipun para jurnalis sudah dibekali kompetensi yang memadai, masih belum cukup untuk bisa menghasilkan produk berita yang berkualitas. Mereka harus juga diberikan perlindungan ketika melaksanakan kerja-kerja jurnalistiknya.

Terkait hal itu, Dewan Pers sangat berterimakasih kepada pihak kepolisian atas kerjasama dalam menyelesaikan sengketa produk jurnalistik. Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri selama ini telah dilaksanakan dengan baik. Kedepan, kesepakatan tersebut hendaknya tetap menjadi pegangan, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers.

Ketiga, kesejahteraan. Selain kompetensi dan perlindungan dalam menjalankan tugas, para jurnalis memerlukan kesejahteraan yang cukup. Tanpa kesejahteraan yang memadai, jurnalis akan terkendala dalam menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Kebutuhan dasar para jurnalis perlu terpenuhi agar mampu menjalankan tugas jurnalistik yang cukup berat. Adalah tidak adil manakala seorang jurnalis dituntut menghasilkan produk berkualitas sementara kebutuhan dasar hidupnya diabaikan atau tidak diperhatikan oleh media dimana mereka bekerja.

Karena itu, Dewan Pers mengajak perusahaan-perusahaan media untuk terus menerus mencari dan melakukan terobosan-terobosan baru di era digital ini. Inilah yang disebut *media business sustainability*, yakni bagaimana mengelola keberlanjutan dari bisnis media. Kalau perusahaan-perusahaan media tidak tumbuh dengan baik maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan *lay off*, atau PHK terhadap karyawan termasuk para jurnalisnya.

Sekarang adalah era migrasi dari *physical space* ke *cyber space*. *Physical space* bersifat *linear space* seperti yang lazimnya 10 – 15 tahun

yang lalu. *Cyber space* sifatnya *imager*. Oleh karena itu kini sedang terjadi konvergensi dan migrasi antara *cyber space* dengan *physical space*, sehingga tidak mungkin mempertahankan bisnis media tanpa melakukan transformasi karena wilayahnya atau *space* nya yang sudah berubah itu.

Maka benar kata Charles Darwin: “bukan yang paling kuat bertahan, bukan pula yang paling cerdas yang bisa bertahan tetapi yang bisa bertahan adalah mereka yang mampu melakukan perubahan”. Sekarang ini era digital yang membawa masyarakat ke era perubahan. Teknologi akan mengantarkan perubahan itu. Oleh karena itu di dalam bisnis media harus dilakukan perubahan terus menerus.

Layanan E-Services Pendataan

Dewan Pers mau tidak mau harus merespons dengan cepat fenomena perubahan itu. Salah satu diantaranya -- demi melindungi jurnalis dari ancaman kriminalisasi -- Dewan Pers harus tahu dengan sungguh-sungguh perusahaan pers yang menaungi jurnalis itu legal atau tidak, sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan serta Pedoman Dewan Pers lainnya.

Maka pendataan dan verifikasi perusahaan pers sangat diperlukan. Sebagai konsekuensinya, Dewan Pers wajib melindungi jurnalis dari ancaman kriminalisasi itu. Oleh karena itu pendataan dan verifikasi perusahaan pers tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Pada intinya, Dewan Pers ingin memberikan perlindungan kepada jurnalis sekaligus ingin menanamkan rasa tanggung jawab kepada insan pers karena kemerdekaan atau kebebasan tanpa tanggung jawab akan membuat kerugian besar bagi masyarakat keseluruhan.

Percepatan verifikasi itu rasanya tidak mungkin kalau hanya dilakukan secara manual seperti lazimnya, sehingga mulai akhir tahun 2019 ada beberapa layanan seperti sertifikasi, pengaduan, pendataan dan lainnya dapat menggunakan *e-services* dan dengan demikian mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat.

Survei Kemerdekaan Pers

Selain itu, Dewan Pers ingin mentradisikan sesuatu yang sifatnya kualitatif. Kualitatif bisa didekati dengan kuantitatif yaitu dengan cara melakukan kuantifikasi dari variabel-variabel kualitatif kemerdekaan pers sebagai bagian dari cita-cita pers Indonesia. Untuk itu dilakukan survei guna mengukur indeks kemerdekaan pers.

Indeks kemerdekaan pers Indonesia yang terakhir memperlihatkan kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi ada beberapa variabel yang sangat krusial yang masih di bawah standar.

Kepedulian media terhadap kelompok yang memiliki atau yang memerlukan pelayanan khusus, misalnya, masih rendah sehingga Dewan Pers ke depan mendorong agar media lebih *friendly* terhadap kelompok tersebut.

Demikianlah dari Indeks Kemerdekaan Pers itu dapat diketahui variabel-variabel yang masih perlu diperbaiki di kemudian hari. ***

Artikel ini merupakan sambutan Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, dalam acara seminar “Refleksi Kebebasan Pers Tahun 2019 dan Peluncuran Buku Mengenal Dewan Pers” di Hotel Sahid Sudirman Jakarta, Rabu 18 Desember 2019. Tegur sapa dihilangkan dan dilakukan penyuntingan seperlunya – Red.



Mohammad NUH



Menkominfo Johnny G Plate: Publik Perlu Informasi Benar, Baik dan Bermanfaat

Indonesia sudah sampai pada suatu titik yang tidak bisa balik kembali (*Indonesia at the point of no return*). Harus terus maju. Terkait kemerdekaan pers, kita harus mengisinya sehingga semakin lebih berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menegaskan hal itu ketika memberikan paparannya dalam seminar “Refleksi Kebebasan Pers Tahun 2019 dan Peluncuran Buku Mengenal Dewan Pers” di Hotel Sahid Sudirman Jakarta, Rabu 18 Desember 2019. Menurutnya, ada tiga tuntutan mendasar terkait informasi yang mesti ditransmisikan kepada publik menyangkut kemerdekaan pers yakni: benar, baik dan bermanfaat.

Mengawali sambutannya, Menkominfo menyatakan, bangsa Indonesia sudah sampai di suatu titik yang tidak bisa balik kembali. Yang ada hanya maju terus. “Kita *at the point of no return*. Kita *improve*, kita kembangkan, kita isi dengan situasi atau keadaan *human rights* di Indonesia dan kebebasan pers yang lebih berkualitas. Itu tugas kita bersama” ujar menteri yang baru menjabat sekitar dua bulan di kementeriannya itu.

Lebih lanjut Menkominfo menyatakan, ada gempuran-gempuran informasi yang begitu hebat masuk ke masyarakat. “Di bidang politik, setahun terakhir ini, Indonesia telah lulus ujian. Dari sisi kebebasan pers, mengemukakan pendapat, *hoax*, *hate speech*, kebohongan dan lain sebagainya, walaupun ditumpahkan begitu hebat kepada publik di media-media, tapi bangsa Indonesia bisa menyeleksi dengan baik. Menurutnya, ada tiga tuntutan mendasar bagi kemerdekaan pers mengenai kualitas informasi yang seharusnya ditransmisikan kepada publik.

Pertama, informasi harus benar. “Di semua media, baik cetak, elektronik maupun sosial media, yang ditransmisikan kepada publik adalah kualitas informasi yang benar. Kebenaran informasi menjadi penentu kualitas informasi. Informasi yang tidak benar dapat menjadi jebakan di era *Firehose of falsehood*. Propaganda yang disemburkan ke ruang publik tidak memiliki manfaat”, ujarnya.

Kedua, membawa kebaikan bagi masyarakat. Menurut Menkominfo, informasi selain benar juga harus membawa

kebaikan bagi masyarakat. Ada informasi yang sudah teruji kebenarannya tapi belum tentu baik untuk ditransmisikan ke ruang publik.

Ketiga, bermanfaat bagi masyarakat. Selain baik dan benar, informasi yang ditransmisikan kepada masyarakat semestinya yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.

“Jadi, suatu informasi harus memenuhi tiga kriteria yaitu benar, baik dan bermanfaat. Itulah tuntutan untuk menghasilkan kualitas informasi di era kebebasan pers yang *at the point of no return ini*”, ujarnya.

Lebih jauh Menkominfo menyatakan, dunia saat ini sedang mengalami migrasi besar-besaran, dari dunia fisik ke dunia digital. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, Indonesia juga ikut bermigrasi: dari negara teritorial menuju negara bangsa, extra-teritorial. Indonesia harus bisa mengelola proses digitalisasi ini dengan benar.

“Indonesia menuju bangsa digital. Pemerintah pun mengambil bagian. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas salah satunya menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk kita beralih menjadi bangsa digital”, ujarnya.

Instrumen yang disiapkan pihaknya mulai dari legislasi, infrastruktur, penataan frekuensi, persiapan digital channel beserta konten yang baik.

“Media maupun pers juga ikut bermigrasi. Dari cetak ke analog, ke digital dan akan terus bermigrasi. *Digital switch on is a must, analog switch off is a must*”, katanya.

Pada saat memasuki revolusi digital, semua media mengalami perubahan. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran bahwa ada satu perspektif yang akan dicapai, ada *roadmap* yang akan ditempuh menuju Indonesia di era digital di bidang pers.

“Nah, ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus mengubah cara berpikir. Kita punya tugas untuk memenangkan era baru, dunia baru, dunia digital”, pungkasnya. **(Red)**



Johnny G Plate



Indonesia Pimpin Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara

Ketua Dewan Pers Indonesia Mohammad NUH terpilih sebagai Ketua South East Asian Press Council Network (*SEAPC-Net*) dalam pertemuan pertama Majelis Umum lembaga baru ini. Pemilihan pimpinan jaringan Dewan Pers Asia Tenggara ini dilaksanakan 4 Desember 2019 di Nusa Dua Bali.

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua *SEAPC-Net* terpilih U Ohn Kyaing dari Myanmar dan Sekretaris Jenderal terpilih Asep Setiawan dari Indonesia.

Sementara itu jajaran Direktur *SEAPC-Net* yang menjabat selama dua tahun ke depan terdiri dari Agus Sudibyo dari Indonesia, Kyaw Swa Min dari Myanmar, Chavarong Limpattampane dari Thailand dan Virgilio da Silva Guterres dari Timor Leste.

Pengurus pertama *SEAPC-Net* terpilih setelah wakil dari Dewan Pers Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste menyetujui Anggaran Dasar *SEAPC-Net* yang bertujuan untuk memajukan profesionalisme jurnalis di kawasan Asia Tenggara. Selain itu *SEAPC-Net* mendorong lembaga-lembaga serupa untuk bergabung untuk mengembangkan pers di kawasan ini.

Mohammad NUH selaku Ketua selain menyampaikan terimakasih kepada semua anggota delegasi, juga berharap hasil pertemuan Dewan Pers Asia Tenggara ini akan mendorong kolaborasi untuk mengembangkan pers di kawasan Asia Tenggara.

Chavarong Limpattampane -- salah satu direktur *SEAPC-Net* dari Thailand -- mengatakan, ini merupakan peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya Dewan Pers di kawasan memiliki jaringan yang terorganisasi. Dia menambahkan bahwa kepemimpinan *SEAPC-Net* berdasarkan rotasi sehingga pada pertemuan tahun 2021 diusulkan untuk dipimpin Myanmar. Dewan Pers Thailand berkomitmen untuk bekerjasama dalam berbagai aktivitas *SEAPEC-Net*.

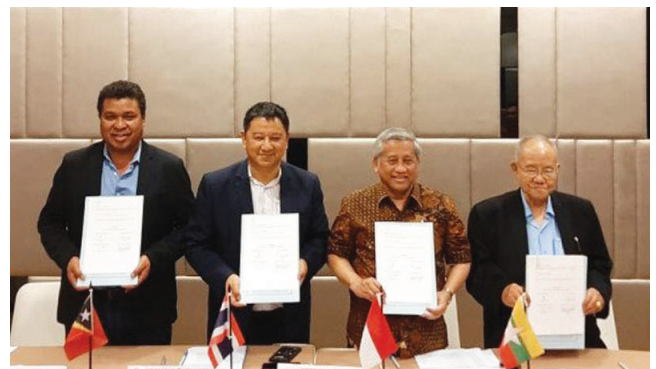
Setelah pertemuan awal

SEAPC-Net didirikan setelah serangkaian pertemuan perwakilan empat Dewan Pers di kawasan Asia Tenggara – Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste – dalam beberapa tahun terakhir. Dalam Deklarasi Dili 2017, empat Dewan Pers mengakui peran Dewan Pers di setiap negara dan lembaga serupa di beberapa bidang seperti *media sustainability, problem of defamation law, rights to information law and disinformation*.

Pernyataan terakhir di Bangkok sebelum bertemu di Bali ditegaskan bahwa wakil Dewan Pers Myanmar, Timor Leste, Thailand dan Indonesia telah melaksanakan

pertemuan pertama *Southeast Asian Press Network* yang pertama tanggal 24 September 2019.

Deklarasi Bangkok ini menyatakan perlunya kerjasama regional Dewan Pers dengan mendirikan sebuah jaringan untuk memperkuat hubungan dan prinsip-prinsip bersama.



Kerjasama Regional South East Asian Press Council Network yang terdiri dari 4 negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar dan Timor-Leste. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bali Ketua Dewan Pers Mohammad NUH terpilih sebagai Ketua *SEAPC-Net*. Rabu (4/12/19).

Dinyatakan pula bahwa keempat Dewan Pers telah bertukar informasi mengenai situasi media dan menandatangani Deklarasi Dili 2017 yang mengakui perlunya peran Dewan Pers setiap negara. Selain itu perlu untuk berbagi informasi tentang hal yang juga terjadi di kawasan Asia Tenggara terkit hal-hal yang disebutkan diatas yakni *media sustainability, problem of defamation law, rights to information law and disinformation*.

Deklarasi Bangkok menyetujui pembentukan *Southeast Asian Press Council* atau *SEAPCN* yang kemudian resminya menjadi *SEAPC Net*. Empat perwakilan Dewan Pers dari Myanmar, Timor Leste, Thailand dan Indonesia akan menjadi pendiri *SEAPC*.

SEAPC bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan memajukan kemerdekaan peras melalui lembaga yang berdiri sendiri (*self-regulating*) dan menghormati Kode Etik Media di kawasan ini.

Dalam pertemuan di Bangkok 24 September itu juga disetujui pembentukan komite kerja untuk menyusun rancangan Anggaran Dasar dari *SEAPC*. Dalam deklarasi di Bangkok 24 September 2019, wakil empat Dewan Pers di Asia Tenggara menyepakati dibentuknya Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara. **(Red)**



Catatan Akhir Tahun **PWI-AJI- IJTI:** Fokus Terhadap Kekerasan Terhadap Jurnalis

Organisasi–organisasi wartawan: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam catatan akhir tahun 2019 – selain menyoroti hal-hal lain terkait kemerdekaan pers -- tetap memfokuskan perhatian pada kekerasan terhadap jurnalis.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Setelah itu diikuti oleh perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5 kasus), pelarangan liputan (4 kasus). Demikian antara lain catatan akhir tahun 2019 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dirilis pada 23 Desember 2019 melalui Ketua Umumnya Abdul Manan.

Melansir *aji.or.id*, kasus kekerasan fisik masih tetap dominan. AJI menilai berulangnya kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis ini lebih karena minimnya penegakan hukum dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan monitoring AJI, sebagian besar kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis sangat jarang berakhir di pengadilan dan pelakunya dihukum secara layak. Meski ada faktor keengganan dari jurnalis (karena kurangnya dukungan perusahaan), faktor terbesar adalah praktik impunitas yang terus berlangsung bagi pelakunya.

Bagi AJI, fakta yang lebih merisaukan pada tahun 2019 ini adalah saat melihat statistik pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan apa yang menjadi penyebabnya. Dari 53 kasus kekerasan, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi, dengan 30 kasus. Pelaku kekerasan terbanyak kedua adalah warga (7 kasus), organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (6 kasus), orang tak dikenal (5 kasus).

Sementara itu dari Medan dikabarkan, Ketua AJI Medan Liston Damanik mengungkapkan tekanan bagi pers di Indonesia kini makin besar. Motif kekerasan terhadap jurnalis di Sumut beragam mulai dari penganiayaan, kekerasan verbal hingga larangan melakukan liputan.

“Pelakunya mulai dari preman, oknum pemerintah, oknum penegak hukum, hingga kalangan akademisi di perguruan tinggi,” ucap Liston.

Dalam *Diskusi Publik RKUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers* di Santika Premiere Hotel Convention Center, Rabu 11 Desember 2019, Liston lebih lanjut menyatakan AJI Medan mengusulkan agar jurnalis menerapkan profesionalisme.

Selain itu, lanjut dia, AJI mendesak aparat keamanan agar serius menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis dan menuntut komitmen penegak hukum terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi jurnalis sesuai UU Pers, dan mengimbau para jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas agar menempuh jalur hukum dan tidak menempuh jalur damai dalam penyelesaiannya.



Agar pro-aktif

Namun Kombes Pol Yusri Yunus - dalam sebuah seminar di Jakarta - mengakui belakangan ini kerap terjadi benturan antara anggota polisi dengan kalangan media terutama saat penanganan aksi unjuk rasa.

Namun Yusri memastikan pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan anggota polisi kepada jurnalis akan diproses secara hukum. Yusri juga meminta kepada Komite Keselamatan Jurnalis untuk lebih pro aktif melaporkan kepada dirinya jika ada kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. (*Etika, November 2019*).

Menurut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sepanjang 2019, kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh aparat negara, organisasi massa, dan masyarakat. Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti



penganiayaan atau pemukulan, tetapi juga teror.

Dalam konferensi pers akhir tahun di Jakarta, Sabtu 28 Desember 2019, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari bersama Sekjen PWI Mirza Zulhad mengungkapkan, kasus wartawan di Aceh menjadi salah satu contoh kekerasan terhadap jurnalis.

“Rumahnya dibakar orang tak dikenal, sebagian kantor PWI Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, juga sempat dibakar, dan kantor redaksi sebuah harian di Bogor, Jawa Barat, diserbu simpatisan partai politik tertentu,” kata Atal.

Ia menilai, penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan wartawan belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers nomor 2/DP/MOU/2/2017-II-2017 yang ditandatangani pada 9 Februari 2017.

Secara rinci Atal menyatakan, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Pertimbangan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dengan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam MoU Kapolri dan Ketua Dewan Pers di antaranya disebutkan, apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan Pers maka penyelesaian mendahulukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.

Di samping itu, apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers dalam proses penyelidikan dan penyidik berkonsultasi dengan Dewan Pers.

“Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pers tidak semuanya diproses sesuai UU Pers dan MoU tersebut,” ucapnya.

Dia menjelaskan, di sejumlah daerah, polisi sebagai penerima pengaduan masyarakat atas pemberitaan, langsung memproses menggunakan UU non Pers, misalnya UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.

Dalam pada itu, menurut Asosiasi Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), secara keseluruhan kasus kekerasan pada jurnalis ada penurunan dibanding tahun lalu. Namun hal ini tetap menjadi peringatan yang harus diwaspadai bagi kebebasan pers di tanah air.

Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana didampingi Ketua Dewan Pertimbangan IJTI Imam Wahyudi dan Dewan Pertimbangan IJTI Makroen Sanjaya, ketika memberikan keterangan pers dalam Refleksi Akhir Tahun IJTI, di Dewan Pers, Senin 30 Desember 2019 mengungkapkan, tahun 2019 kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis televisi tergolong tinggi.

Divisi Bidang Advokasi IJTI mencatat secara khusus ada 20 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis televisi di seluruh Indonesia. Kekerasan ini terjadi saat melakukan liputan di berbagai daerah di tanah air

Pola kekerasan yang terjadi pada jurnalis TV sangat beragam, mulai dari kekerasan, intimidasi dan persekusi.

Begitu juga dengan pelakunya mulai dari oknum aparat kepolisian, aparat pemerintahan, hingga warga sipil atau massa.

Masih maraknya kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis menjadi catatan tersendiri serta ancaman serius bagi kebebasan pers di tanah air.

“IJTI mendorong agar kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius dari semua pihak terutama aparat penegak hukum, pemerintah serta elemen yang konsisten menjaga kebebasan pers. Kasus kekerasan terhadap jurnalis harus diselesaikan secara tuntas di ranah hukum”, pungkas Yadi.

(HT/ dari berbagai sumber).

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- ♦ Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id
- ♦ Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers
- ♦ Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Perlu Regulasi Konvergensi Media

Regulasi di era konvergensi media sangat diperlukan. Regulasi ini penting untuk melindungi kepentingan nasional.

Topik itu dibahas dalam diskusi Ketua Dewan Pers Muhammad NUH bersama anggota Dewan Pers dengan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan para Pemimpin Redaksi MNC Media. Hadir pula para anggota Dewan Pers.

“Masuknya siber ini masih relatif baru, tapi punya dampak sangat luar biasa. Tidak mungkin Dewan Pers menyelesaikan sendiri, karena itulah kami mengajak seluruh konstituen, pemangku kepentingan untuk *ayo bareng-bareng* menghadapi dunia baru ini,” kata M NUH dalam kunjungannya ke MNC Tower, Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.

Mengutip *iNews.id*, menurut NUH aspek regulasi, perlindungan industri, dan edukasi sangat diperlukan. “Jangan sampai, regulasi dibuat namun tidak sesuai fenomena riil, salah satunya konvergensi”, ujarnya.

Mantan Menkominfo itu mengatakan, aturan harus melibatkan seluruh sektor sehingga diperlukan pembahasan menyeluruh baik dari pihak pelaku industri, Dewan Pers, DPR, dan kementerian terkait. “Semuanya harus ramai-ramai, karena ini masa depan kita,” tuturnya lagi.

NUH mencontohkan sekitar dua atau tiga tahun lalu, ramai isu tentang taksi online, di mana teknologi sudah

sampai di Indonesia namun belum ada kebijakan atau regulasi terkait itu. Imbas dari fenomena ini, terdapat gap di antara keduanya.

Dia mengatakan, Dewan Pers menilai aturan harus sesuai dengan perubahan kemajuan teknologi itu. “Dewan Pers sangat berterima kasih bisa bersilaturahmi dengan Pak Hary Tanoe, seorang yang bukan hanya berpengetahuan, tapi langsung mempraktikkan di dunia digital,” kata Nuh.

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, di era konvergensi ini, satu aplikasi bisa mengerjakan semua. Konten

terkait dengan pers, video, *e-commerce*, bisa dikerjakan di satu aplikasi *super-apps*.

Hal ini perlu diwaspadai, sebab umumnya para pemain digital yang besar adalah asing. “Bukan anti-asing, tidak, maksud saya bagaimana bisnis itu jalan, industri itu bisa berkembang dengan baik dan tetap melindungi pemain nasional, pemain lokal,” kata Hary Tanoe.

Dia menekankan, kepentingan nasional harus dilindungi. “Karena di Indonesia masih banyak masyarakat kita yang belum diangkat kesejahteraannya,” pungkasnya.

(red/ dari iNews.id)



Ketua Dewan Pers M.Nuh dan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Tahukah Anda.....?

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.



Pers Harus Jaga Independensi

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menekankan, pers harus senantiasa menjaga menjaga independensi dalam penyajian pemberitaan. Tujuannya untuk menjaga fungsi pers tetap dalam koridor UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Berbicara pada acara Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Hotel Santika Medan, Rabu 11 Desember 2019, Hendry lebih lanjut menyatakan, independensi merupakan sifat hakiki pers. Artinya, wartawan dalam menyajikan karya jurnalistik harus berlandaskan hati nurani. "Independensi ini tak bisa diabaikan pers," ujarnya.

"Wartawan jangan sampai ikut-ikutan menjadi tim sukses dalam pilkada atau bahkan terjun dalam politik praktis. Hal ini akan sangat mengganggu independensi media dan kepercayaan publik. Pers lokal harus bisa menjaga independensi dan profesionalismenya dalam pilkada tahun 2020"

Terkait independensi pers di Sumatera Utara dikaitkan dengan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019, kata Hendry, kondisinya menurun 3 digit dibanding IKP 2018.

Hal ini terjadi karena masih adanya intervensi pihak kuat diantaranya dari unsur pemerintah, perusahaan komersil dan pimpinan perusahaan pers.

"Ke depan, IKP di Sumut perlu ditingkatkan dari level agak bebas menjadi cukup bebas melalui penguatan independensi pers melalui idealisme dan etika pers", pungkash mantan Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.

Dalam pada itu, PWI Pusat dalam catatan akhir tahun 2019 selain menyoroti peran pers dalam gelaran pemilihan presiden, juga memberikan perhatian terhadap independensi media.

Menurut Ketua Umum PWI Atal Depari, independensi media banyak dipersoalkan publik ketika berlangsungnya gelaran pemilu. Beberapa media cenderung berpihak pada salah satu kandidat. Berita-berita atau informasi yang disuguhkan cenderung membangun citra positif kandidat

tertentu dan cenderung merugikan atau membangun citra negatif kandidat lainnya.

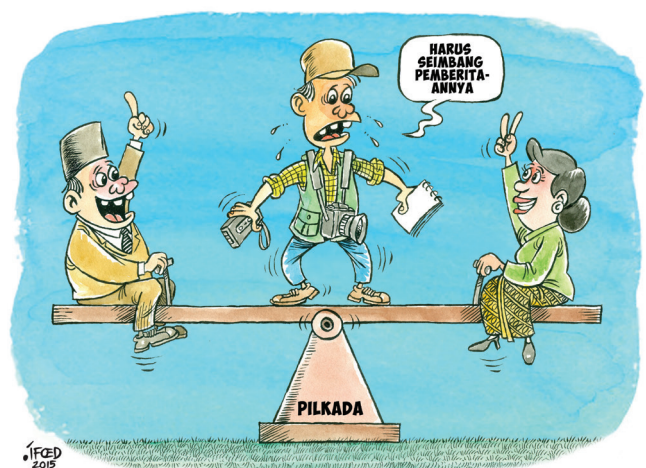
Di samping itu, tambah Atal, profesionalisme pers harus mendapat perhatian serius. Beberapa media kurang hati-hati pada informasi yang berbau hoaks.

"Bukannya menghindar, alih-alih justru turut menyebarkan. Termasuk media arus utama sering kali tidak melakukan tiga prinsip utama jurnalistik, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi. Informasi yang bernada hoaks langsung disiarkan di media berbasis jurnalistik secara ramai-ramai", ujarnya.

Lebih jauh PWI mengingatkan, tahun 2020 adalah juga tahun politik. Akan diselenggarakan 270 pilkada di seluruh Indonesia. Diharapkan kelemahan-kelemahan media dalam menyikapi Pemilu sebelumnya tidak terulang. Media tidak boleh partisan. Media jangan ikut menyebarkan hoaks. Media harus kembali kepada jati dirinya dan tetap menjaga independensi news room dan bekerja secara profesional dengan melakukan uji informasi melalui konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi.

"Wartawan jangan sampai ikut-ikutan menjadi tim sukses dalam pilkada atau bahkan terjun dalam politik praktis. Hal ini akan sangat mengganggu independensi media dan kepercayaan publik. Pers lokal harus bisa menjaga independensi dan profesionalismenya dalam pilkada tahun 2020", pungkashnya.

(Red/diolah dari antara.com/sumber lain)



Media *Orbitdigitaldaily.com* Langgar KEJ

Dewan Pers dalam keputusan akhirnya menyatakan media siber *orbitdigitaldaily.com* melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni Pasal 1 dan 3 karena menyajikan berita tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers menerima pengaduan Kalam Liano atas 16 berita yang diunggah media siber *orbitdigitaldaily.com* antara 4 Juli sampai 4 Oktober 2018. Berita sebanyak itu, menurut Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak dan rekan, dinilai tidak uji informasi, tidak jelas narasumbernya, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, bohong, melanggar asas praduga tak bersalah dan beritikad buruk karena terus menerus memberitakan hal-hal negatif tentang Pengadu.

Secara agak rinci dapat dijelaskan, berita-berita tersebut (16 berita) memuat informasi mengenai “Rumah Makan Pondok Mansyur” yang dimiliki oleh Pengadu yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menempati tanah yang sedang bersengketa.

Di dalam seluruh berita yang diadukan, hanya sedikit memuat konfirmasi dari Pengadu atau kuasa hukumnya, misalnya dalam berita “Bandel Tak Urus IMB Satpol PP Medan Bongkar Bangunan Pondok Mansyur”. Sebagian berita lebih banyak menyoroti pemerintah daerah yang dinilai tidak tegas untuk segera membongkar “Pondok Mansyur”, padahal bangunan tersebut belum memiliki IMB dan sudah mendapat surat peringatan dari pemerintah daerah.

Setelah berproses di Dewan Pers sebagaimana mekanisme penanganan pengaduan yakni melalui upaya mediasi, maka akhirnya Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi terhadap media siber tersebut.

Dewan Pers memutuskan Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena menyajikan berita tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Berita-berita *orbitdigitaldaily.com* memuat informasi negatif tentang Pengadu

tanpa disertai konfirmasi dan verifikasi yang memadai.

Karena itu, Dewan Pers merekomendasikan *orbitdigitaldaily.com* wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu sebanyak dua kali disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat, selambat-lambatnya 2x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

Media ini wajib memuat catatan di bagian bawah berita berjudul “Pondok Mansur Belum Juga Dibongkar Kasatpol PP, Saya Tanya Anggota Dulu”. Pondok Mansyur Bermasalah, Dewan: yang Keberatan Bikin Pengaduan ke Komisi” yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan menyertakan tautan berisi Hak Jawab dari Pengadu dan permintaan maaf dari *orbitdigitaldaily.com*.

Selain PPR terhadap *orbitdigitaldaily.com*, pada Desember 2018 Dewan Pers juga mengeluarkan PPR untuk media siber *seputarbabel.com* atas pengaduan Fachrizal Novian dan PPR untuk Harian *Waspada* atas pengaduan M. Teguh (Eli/HT).



IFCED
2015

Galeri

Rapat Dengar Pendapat antara Ketua dan Anggota Dewan Pers dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/19).



Mediasi antara Achamd Baidowi dengan media siber *netralnews.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (4/12/19).

Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH (berdiri) menyampaikan paparan dalam sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Bali pada Rabu (4/12/19).



Pertemuan jaringan South East Asian Press Council (SEAPC-Net) di Bali mengangkat Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH sebagai Ketua SEAPC-Net selama 2 tahun ke depan. pada Rabu (4/12/19).





Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH (kanan) menyatakan pentingnya kemerdekaan pers. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di sela-sela kegiatan Bali Democracy Forum yang ke-12 di Bali, Kamis (5/12/19).

Tenaga Ahli Dewan Pers, Herutjahjo (kemeja garis-garis) memimpin mediasi kedua pengaduan F Indra Kurniawan terhadap Brigade Nusantara News di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Kamis (5/12/19).



Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH menyerahkan plakat kepada Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins di kediaman Duta Besar, Hadir dalam pertemuan yang membahas antara lain kemerdekaan pers di Indonesia anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Arif Zulkifli, Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Senin (9/12/19).

Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya (kemeja putih) menjadi pembicara dalam seminar NAasional "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan Dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" diselenggarakan oleh AJI Indonesia, SEJUK, Tempo Institute, Media Link, dan LPDS dengan didukung oleh IMS, Kingdom of Netherlands dan British Embassy Jakarta, di Jakarta, (10 /12/19).



Galeri

Penandatanganan MoU antara Universitas Gadjah Mada dengan Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH (kiri) dan Rektor Universitas Gadjah Mada, Panut Mulyono di Ruang Rapat Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (10/12/19).



Peluncuran Buku Mengenal Dewan Pers oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH (kedua dari kiri) dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (tengah) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/12/19).

Seminar Refleksi Kebebasan Pers dan Peluncuran Buku Mengenal Dewan Pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/12).



Rapat Pembentukan Taskforce Media Sustainability yang dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dan dihadiri oleh berbagai kalangan pers berlangsung di Ruang Rapat Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (23/12/19).

